

## Menguatnya Ikatan Patronase dalam Perpolitikan Indonesia

Dina Fadiyah, Umami Zakiah

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

dinafadiyah14@hotmail.com

### Abstrak

Tulisan ini bermaksud ingin melihat bagaimana menguatnya ikatan patronase dalam perpolitikan Indonesia saat ini. Euforia politik di Indonesia semakin hari kian menarik, pasalnya esensi politik yang terjadi tidak melulu mengenai politik murni, tetapi sudah terkontaminasi dengan berbagai unsur dan kepentingan yang ada. Hal itu lah yang membuat para elit politik harus mempunyai strategi jitu guna memperkuat posisinya. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif dan didapatkan temuan bahwa menguatnya ikatan patronase dalam perpolitikan Indonesia disebabkan oleh saling membutuhkannya atau simbiosis mutualisme antara elit politik dengan berbagai unsur seperti organisasi masyarakat misalnya.

**Kata kunci: Menguatnya, Patronase, Politik Indonesia**

### Abstract

*This paper intends to see how the strengthening of patronage ties in Indonesian politics today is strengthened. The political euphoria in Indonesia is increasingly interesting, the article of political essence that occurs is not only about pure politics, but has been contaminated with various elements and interests. This is what makes the political elite must have a precise strategy to strengthen their position. This paper uses qualitative methods, descriptive and found that the strengthening of patronage ties in Indonesian politics is caused by mutual need or mutualism symbiosis between political elites and various elements such as community organizations for example.*

**Keywords: Strengthening, Patronage, Indonesian Politics**

## PENDAHULUAN

Tulisan ini bermaksud ingin melihat bagaimana menguatnya ikatan patronase dalam perpolitikan Indonesia saat ini. Politik Indonesia dewasa ini seperti sedang mendominasi wacana di media. Layaknya gula yang sedang di kelilingi semut, seperti itulah media yang memberitakan kondisi politik di Indonesia. Saat ini kondisi politik yang terjadi justru saling memperebutkan kekuasaan. Para pejabat yang memiliki kekuasaan telah melupakan masyarakat. Janji-janji yang dulu di buat justru di lupakan seiring dengan kursi kekuasaan yang di peroleh. Seolah tidak menerima dengan kemenangan sang rival, maka berusaha mencari kesalahan untuk dapat menggulingkan.

Kondisi politik di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Para pejabat masih saja sibuk mengurus kursi jabatannya. Lagi-lagi mereka melupakan soal

rakyat. Kondisi tersebut sangatlah memprihatinkan. Hal tersebut masih salah satu contoh yang ada. Berbicara kondisi politik di Indonesia maka tidak akan jauh dari sebuah kekuasaan. Dewasa ini politik justru seringkali di gunakan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Ntah dengan apa pun, tidak melihat rambu rambu yang ada, hal yang terpenting kursi kekuasaan harus di dapat. Namun, kursi kekuasaan itu harus di bayar dengan pengorbanan yang besar juga baik itu fikiran dan materil.

Akhirnya rakyat yang menjadi korban dari kondisi politik yang ada sekarang. Para birokrat bangsa ini sepertinya masih terlalu sibuk untuk terus berebut kursi kekuasaan. Sebenarnya politik layaknya sebuah pisau. Bila pisau tersebut di gunakan oleh ibu rumah tangga untuk memasak maka pisau akanlah sangat bermanfaat. Maka akan tersedia hidangan yang lezat untuk keluarga. Namun beda cerita bila pisau tersebut di gunakan oleh pembunuh. Maka yang terjadi adalah sebuah kesedihan dan kesengsaraan yang terjadi. Begitu pula dengan politik, ia akan bisa menjadi sebuah alat untuk mencapai sebuah kebahagiaan atau malah menjadi sebuah kesengsaraan.

Dewasa ini, para politikus yang ada justru tidak mampu memberikan sebuah kesejukan di tengah gerahnya suasana politik yang ada. Para politikus ini nampaknya masih terlalu sibuk. Padahal rakyat Indonesia di luar sana menjadi korban mereka. Sekarang ini keadaan politik di Indonesia tidak seperti yang diinginkan. Banyak rakyat beranggapan bahwa politik di Indonesia adalah sesuatu yang hanya mementingkan dan merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Pemerintah Indonesia pun tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian rakyat yang mengeluh, karena hidup mereka belum dapat disejahterakan oleh negara. Pandangan masyarakat terhadap politik itu sendiri menjadi buruk, dikarenakan pemerintah Indonesia yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat dengan baik. bagi mereka politik hanyalah sesuatu yang buruk dalam mencapai kekuasaan.

Jika hal ini terus di biarkan, maka seperti bom yang terus di pendam. Maka suatu saat akan meletus juga. Jika kondisi pemerintah terus seperti ini maka tidakl mustahil jika rakyat tidak akan percaya dengan politik. Ketidakpercayaan para rakyat inilah yang sangat berbahaya bagi kestabilan negara. Akibatnya

masyarakat akan cenderung apatis terhadap kondisi sebuah negara. Karena kestabilan negara juga di pengaruhi oleh kestabilan politik yang ada di negara tersebut. Apabila gejolak politik di suatu negara terus menerus berkejolak maka tidak mustahil jika terjadi peperangan. Akibatnya masyarakat yang menjadi korban seperti negara-negara di timur tengah.

Salah satu contoh nyata adalah meluasnya ikatan patronase antara elit politik dengan berbagai unsur seperti organisasi masyarakat misalnya. Kasusnya, pada pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu, Anies-Sandi menggandeng organisasi masyarakat untuk dapat meraih suara. Organisasi masyarakat yang sukses dalam mensukseskan pasangan Anies-Sandi yaitu Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI). Organisasi masyarakat yang seharusnya independen, tetapi kini sangat banyak yang menjadi perpanjangan politik dari berbagai elit politik. Berbagai organisasi masyarakat kini menjelma menjadi perpanjangan politik seperti FBR, FPI, Pemuda Pancasila, FUI, Hizbut Tharir, dsb. Hal demikian yang membuat penulis ingin menelisik lebih dalam terkait menguatnya ikatan patronase dalam perpolitikan Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Patron-Klien**

Beberapa literatur yang telah dihasilkan oleh beberapa ilmuwan sosial dan politik mengakui bahwa praktek-praktek kekuasaan patron-klien yang sudah ada pada masa pra-kolonial, tetapi berlangsung pada masa Orde Baru, bahkan hingga saat ini. Pendapat tersebut dibenarkan oleh Eko Sutoro yang melihat adanya ciri khas seperti, kedudukan, tingkah laku dan keseluruhan hirarkhi dalam struktur kekuasaan sebagian besar tergantung pada hubungan personal kekeluargaan atau antara patron (bapak) dan klien (anak buah).<sup>1</sup>

Konsep patron-klien sebenarnya berangkat dari teori pertukaran sosial (social exchange theory) yang dikemukakan oleh Blau, bahwa ketidakseimbangan dalam masyarakat terhadap materi dan keadaan sosial adalah menghasilkan

---

<sup>1</sup> Eko Sutoro. 2003. *Transisi Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta : APMD Press), hlm. 50

perbedaan dalam kekuasaan<sup>2</sup>. Maksudnya struktur kekuasaan muncul karena terjadinya suatu hubungan pertukaran yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan pertukaran melahirkan kesenjangan kekuasaan dan ketidakseimbangan rasa hormat, sehingga menjadi sangat relevan dengan dasar hubungan patron-klien. Dalam konsep pertukaran sosial, mensyaratkan salah satu diantara dua pihak yg melakukan pertukaran harus memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh pihak lainnya, sedangkan pihak penerima (pihak lain tersebut) tidak memiliki sumber daya yang sama nilainya untuk dipertukarkan dengan pihak pemberi. Sehingga satu-satunya cara untuk membalas pertukaran ini adalah dengan memberikan kepatuhan (menerima posisi sebagai subordinasi) kepada pihak pemberi sumber daya tadi.

Secara konsep patron-klien lebih spesifik membahas tentang adanya pertukaran sosial. Salah satu ilmuwan sosial dan politik, Scott mengemukakan bahwa hubungan patron-klien sebagai hubungan pertukaran antara dua orang (dyadic) yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental, di mana seorang individu yang lebih tinggi status sosial ekonominya (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan perlindungan dan/atau keuntungan kepada seseorang dengan status lebih rendah (klien) yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan dukungan dan bantuan, termasuk jasa pribadi kepada patron<sup>3</sup>.

Dalam hubungan patron-klien, ada pihak yang menjadi superior (patron) dengan kelebihan status sosial dan ekonominya, dan pihak yang menjadi inferior (klien) karena status sosial dan ekonominya lebih rendah. Orang-orang berada pada posisi sebagai inferior tidak dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada kondisi seperti inilah sang patron membantu memenuhi kebutuhan kliennya dengan status dan sumber dayanya. Pelras menambahkan bahwa hubungan patron-klien digolongkan sebagai hubungan yang tidak sejajar (tetapi tidak

---

<sup>2</sup> Patrick Spread. 1984. "Blau's Exchange Theory, Support and the Macrostructure." The British Journal of Sociology, Vol. 35, No. 2, pp.162. Diakses tanggal 12 Februari 2013, dari <http://www.jstor.org/stable/590230>

<sup>3</sup> James Scott. 1972a. Op.Cit.pp. 92. Diakses tanggal 30 November 2014, dari <http://www.jstor.org/stable/1959280>

mengikat) antara atasan (patron atau pemimpin) dengan sejumlah bawahan (klien, pelayan, atau pengikut), berdasarkan pertukaran pelayanan yang asimetris, di mana secara de facto patron tergantung kepada para klien yang memberi pelayanan cuma-cuma yang bisa mencakup kewajiban secara ekonomis, tugas-tugas dengan upah atau tidak, menjadi prajurit perang, dukungan politik dan pelayanan lainnya, diimbangi dengan peran patron untuk menjadi figure pemimpin bagi semua klien dan pemberian bantuan, termasuk pinjaman uang dan perlindungan<sup>4</sup>.

Namun, bila dicermati dalam relasi patron-klien, sulit untuk menentukan siapa yang paling diuntungkan atas pertukaran-pertukaran tersebut, sebab bisa saja hal tersebut berlangsung secara seimbang. Patron menyediakan kebaikan, pekerjaan, perlindungan, atau bahkan jabatan, sedangkan klien menawarkan penghormatan dan dukungan politik. Sehingga jika dicermati hubungan semacam ini akan terasa sulit membedakan “siapa yang memanfaatkan siapa” sebab sebenarnya masing-masing pihak mendapatkan sesuatu yang diharapkannya<sup>5</sup>.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur pengumpulan data yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus.

Penelitian studi kasus melibatkan kajian isu yang dieksplorasi melalui satu atau lebih kasus dalam sistem yang terikat<sup>6</sup>. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti mengeksplorasi sebuah sistem yang terikat (kasus) atau sistem majemuk yang terikat (kasus-kasus) dalam suatu waktu

---

<sup>4</sup> Pelras, Op.Cit, hlm. 2-3

<sup>5</sup> Yahya Muhaimin. 1990. “Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia”. Dalam Ahmad Zaini Abar (ed). *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru: Esei-Esei dari Fisipol Bulaksumur*, (Surakarta: CV. Ramadhani), hlm. 25

<sup>6</sup> Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks : Sage, hlm. 73

melalui koleksi data yang detail dan mendalam, melibatkan sumber informasi majemuk (misalnya, observasi, wawancara, materi audiovisual, dokumen, dan laporan).

Tujuan dipilihnya studi kasus dalam penelitian ini karena studi kasus dianggap mampu membongkar kasus yang dipilih dengan komprehensif. Untuk menjawab kasus ini, maka penulis akan mengupas pertanyaan besar yang menjadi karakter studi kasus yaitu pertanyaan “bagaimana” berkaitan dengan bagaimana menguatnya ikatan patronase dalam perpolitikan Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pilkada DKI Jakarta 2017**

Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 diselenggarakan pada 15 Februari 2017 pada putaran pertama dan 19 April 2017 untuk putaran kedua. Gubernur bertahan Basuki Thahaja Purnama (Ahok) kembali mencalonkan diri pada kontestasi politik kali ini. Pilkada ini merupakan pemilihan kepala daerah ketiga bagi Jakarta yang dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan.

Pemilihan Gubernur kali ini diikuti oleh tiga pasangan kandidat dan banyak wajah baru yang muncul pada kontestasi politik kali ini. Tentunya, sangat menyita banyak perhatian bagi masyarakat Indonesia, terutama warga DKI Jakarta. Berikut ini merupakan daftar calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan nomor urut :

**Tabel 2. Nomor Urut Kandidat dan Partai Politik Pengusung pada Putaran Pertama<sup>7</sup>**

No. Urut	Kandidat Gubernur	Kandidat Wakil Gubernur	Partai Politik Pengusung
1.	Agus Harimurti Yudhoyono	Sylviana Murni	1. Partai Demokrat 2. Partai Amanat Nasional (PAN) 3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2.	Basuki Tjahaja Purnama	Djarot Saiful Hidayat	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 2. Partai Golongan Karya (GOLKAR) 3. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 4. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
3.	Anies Rasyid Baswedan	Sandiaga Salahuddin Uno	1. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

**Tabel 3. Nomor Urut Kandidat dan Partai Politik Pengusung pada Putaran Kedua<sup>8</sup>**

No. Urut	Kandidat Gubernur	Kandidat Wakil Gubernur	Partai Politik Pengusung
2.	Basuki Tjahaja Purnama	Djarot Saiful Hidayat	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 2. Partai Golongan Karya (GOLKAR) 3. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 4. Partai Nasional Demokrat (NASDEM) 5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 6. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

<sup>7</sup> KPUD Jakarta Undi Nomor Urut Cagub DKI Jakarta 2018  
<https://www.rappler.com/indonesia/berita/150254-kpud-jakarta-undi-nomor-urut-cagub>  
diakses pada tanggal 14 Juni 2018 pukul 11.17 WIB

<sup>8</sup> *ibid*

3.	Anies Rasyid Baswedan	Sandiaga Salahuddin Uno	1. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3. Partai Amanat Nasional (PAN)
----	-----------------------	-------------------------	--

Pada putaran pertama, hanya dua kandidat yang lolos untuk melanjutkan ke putaran kedua, yaitu Ahok-Djarot dan Anies-Sandi dengan perolehan suara masing-masing 42.87% dan 39.76%. Memasuki putaran kedua, Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan dukungan kepada Anies-Sandi, jadi hasil akhir mereka diusung oleh tiga partai. Sementara, hasil akhir suara pemelukada DKI Jakarta putaran kedua yaitu Ahok-Djarot 42.05% dan Anies-Sandi 57.95%. Berikut adalah hasil akhir perolehan suara<sup>9</sup> :

**Gambar 1. Hasil Perolehan Suara Pilgub DKI 2017**



Dari hasil perolehan suara diatas menunjukkan bahwa pasangan Anies-Sandi lah yang memenangkan ajang pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Dalam laporan yang dilangsir oleh KPU, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengatakan bahwa peran organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang ada di Jakarta sangat terasa, peran ormas semakin meningkat dan signifikan dalam mengawal Pilgub DKI Jakarta 2017 silam

### **B. Menguatnya ikatan patronase dalam pilkada DKI Jakarta 2017**

Pada sub-bab ini penulis akan coba menguak tentang pertukaran sumber daya yang terjadi antara Anies-Sandi dan Forkabi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Sesuai dengan teori James Scott yang penulis

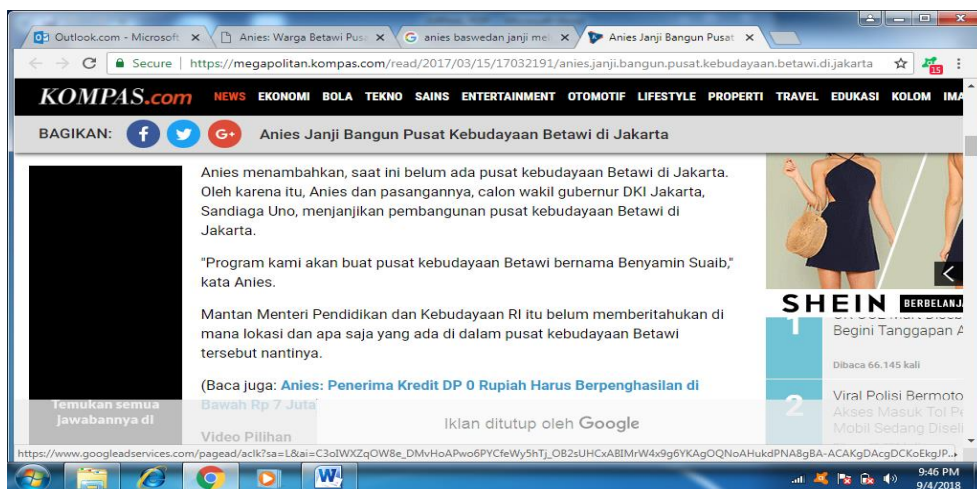
<sup>9</sup> www.kpu.go.id diakses pada tanggal 12 Mei 2018 pukul 98.10 WIB



gunakan dalam penelitian ini, salah satu ciri hubungan patron klien adalah adanya suatu ketimpangan dalam pertukaran. Pada kasus pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yaitu antara Anies-Sandi dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), pertukaran sumber daya juga terasa hadir diantara hubungan keduanya. Merujuk pada 5 hal arus patron ke klien yang dipaparkan oleh James Scott, maka pertukarannya sebagai berikut<sup>10</sup> :

1. **Sarana Dasar Subsistensi**, adalah jasa utama yang diberikan oleh patron. Anies-Sandi yang sedari kecil hidup di Jakarta dan dikelilingi oleh masyarakat etnis Betawi, paham betul bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat asli Betawi sesungguhnya adalah tetap eksisnya kebudayaan Betawi yang semakin hari semakin teriris. Point utama yang diberikan Anies-Sandi kepada Forkabi adalah harapan bahwa akan tetap dan semakin ditingkatkannya kebudayaan Betawi, seperti yang tertera pada berita berikut :

**Gambar 2. Janji Anis-Sandi Pilgub DKI 2017**



Gambar diatas adalah berita yang mengatakan bahwa Anies sebagai Cagub DKI Jakarta berjanji akan mendirikan pusat kebudayaan Betawi di DKI Jakarta. Program pusat kebudayaan Betawi tersebut akan dinamakan Benyamin Sueb.

<sup>10</sup> Anies: Warga Betawi Pusatnya Demokrasi di Indonesia  
<https://news.detik.com/berita/d-4192969/anies-warga-betawi-pusatnya-demokrasi-di-indonesia>  
diakses pada tanggal 4 September 2018 pukul 22.10 WIB

2. **Jaminan Krisis Subsistensi**, sering kali Anies-Sandi mulai intens membantu Forkabi dalam melestarikan kebudayaan Betawi, salah satunya dengan cara mendatangi perkampungan Betawi Setu Babakan yang ada di kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan<sup>11</sup>.

**Gambar 3. Kunjungan Kampung Budaya Anis-Sandi**



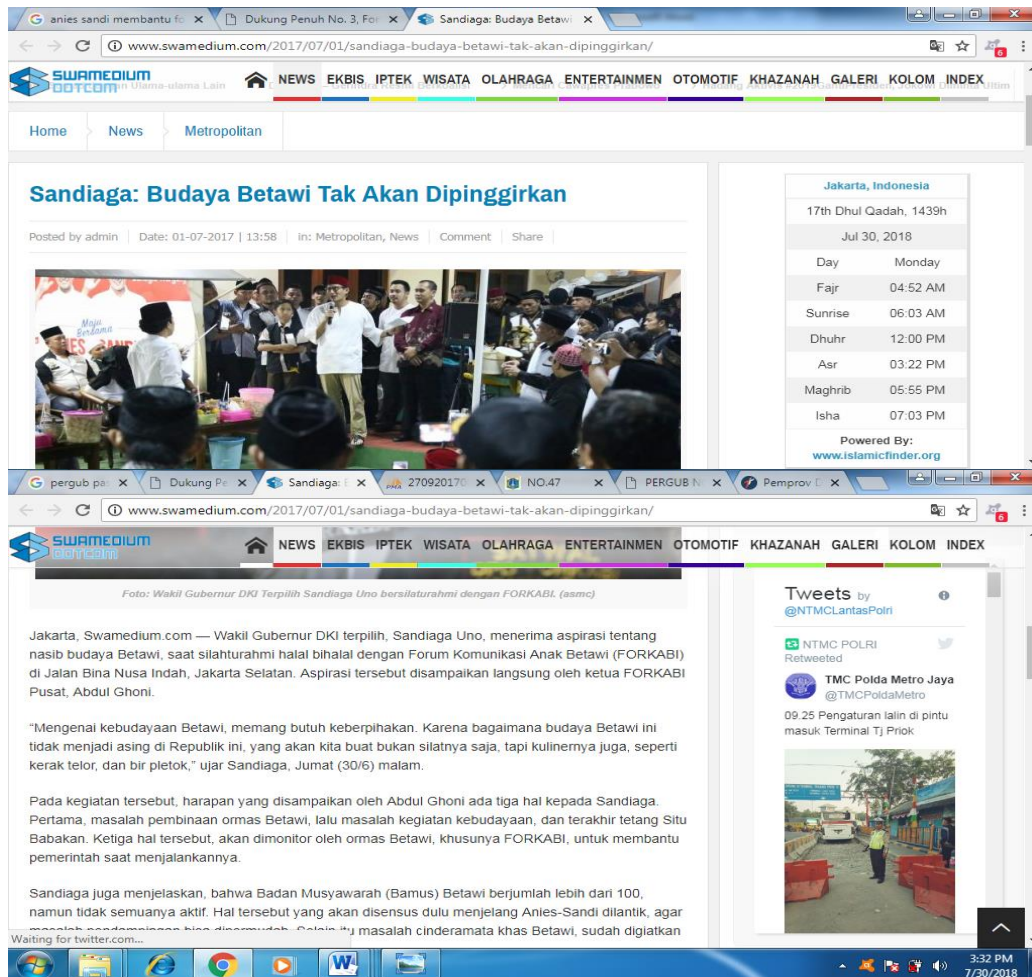
Gambar tersebut merupakan foto salah satu sudut yang ada di perkampungan kebudayaan Betawi Setu Babakan kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan.

3. **Perlindungan**, perlindungan ini berarti melindungi klien dari gangguan atau tekanan dari pihak lain. Anies-Sandi yang notabene sudah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, selalu totalitas dalam melindungi organisasi masyarakat Betawi agar tetap terus eksis dan dikenal oleh masyarakat luas. Tidak jarang banyak oknum yang ingin menjatuhkan organisasi masyarakat Betawi, misalnya seperti pernah beberapa kali posko Forkabi diserang, tetapi para anggota Forkabi tidak pernah meladeni, karena Forkabi adalah organisasi masyarakat yang sesungguhnya, bukan organisasi preman yang

<sup>11</sup> <https://metro.tempo.co/read/1111627/rombongan-anies-baswedan-dihadang-jawara-di-setu-babakan> diakses pada tanggal 4 September 2018 pukul 21.50 WIB

menggunakan kedok sebagai organisasi masyarakat. Berikut merupakan statement Sandi terkait perlindungan terhadap Forkabi<sup>12</sup> :

**Gambar 4. Janji Anis-Sandi Penguatan Budaya Pilgub DKI 2017**



Dari berita tersebut jelas bahwa Anies-Sandi akan selalu melindungi dan melestarikan kebudayaan Betawi, termasuk berbagai ancaman yang datang dari pihak luar. Apalagi kini sudah ada pergub pasal 47 ayat 1 bahwa pengelola hotel dan mall harus menyediakan hasil produk budaya Betawi, serta menggunakan pakaian Betawi ketika pelantikan pegawai di Balai Kota.

<sup>12</sup> Sandiaga: Budaya Betawi Tak Akan Dipinggirkan  
<http://www.swamedium.com/2017/07/01/sandiaga-budaya-betawi-tak-akan-dipinggirkan/>  
diakses pada tanggal 20 Mei 2018 pukul 14.33 WIB

4. **Pengaruh**, dalam hal ini Anies-Sandi sebagai patron mampu memberikan pengaruh agar Forkabi beserta anggotanya tetap konsisten dalam memberikan dukungan kepadanya. Misalnya seperti selalu hadir ketika diundang oleh masyarakat Betawi termasuk Forkabi seperti gambar dibawah ini :

**Gambar 5. Rombongan Anis-Andi Saat Kampanye**



Gambar diatas adalah foto Bapak Gubernur Anies Baswedan beserta istri dan rombongannya yang turut hadir pada acara ulang tahun Betawi yang diadakan pada hari Jumat –Minggu tanggal 27-29 Juli 2018. Acara yang diadakan di perkampungan Betawi Setu Babakan kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan tersebut, dihadiri oleh berbagai tokoh dan organisasi masyarakat Betawi. Acara tersebut diadakan setiap tahun untuk memperingati ulang tahun Betawi.

5. **Jasa Kolektif Patron**, secara internal, patron sebagai kelompok dapat melakukan fungsi ekonomi kolektif. Mereka bisa mengelola dan memberikan bantuan berupa subsidi untuk badan amal setempat, menyumbangkan tanah untuk kepentingan komunal, mendukung pelayanan public lokal dan sebagainya. Dalam kasus Anies-Sandi dan Forkabi, Anies-Sandi diibaratkan sebagai sosok yang mampu memberikan fungsi ekonomi kolektif bagi para anggota Forkabi, dalam artian bahwa patron dapat menyumbangkan kelebihan ekonominya untuk kegunaan kolektif kemasyarakatan. Mereka bisa memajukan

kepentingan masyarakat dengan mensponsori berbagai kegiatan atau ikut aktif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Forkabi. Anies-Sandi selalu men-*support* berbagai kegiatan yang diadakan oleh Forkabi, seperti acara ulang tahun Betawi diatas, Anies-Sandi tidak hanya hadir, tetapi juga memberika sponsor untuk mendukung berjalannya acara tersebut.

## KESIMPULAN

Menguatnya ikatan patronase dalam perpolitikan di Indonesia memang benar adanya. Dari kasus yang penulis jadikan contoh dan bahasan adalah pada pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu, dimana Anies-Sandi menggandeng salah satu organisasi masyarakat Betawi yaitu Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI). Anies-Sandi sukses meraih simpati dan suara dari organisasi masyarakat tersebut, dengan pola patronase yang dibangun oleh keduanya.

Hal tersebut membuktikan bahwa gejala patronase di Indonesia masih tetap eksis berakar dalam perpolitikan di Indonesia, meskipun perpolitikan kita semakin hari kian terkesan modern ataupun kekinian misalnya dengan menggunakan media sosial sebagai basis kampanye, tetapi kita tetap bisa menafikkan bahwa model-model lama seperti patronase juga tetap berhasil eksis di dalam dunia politik.

Eksistensi patronase kemungkinan didasari oleh semakin menguatnya rasa ketergantungan ataupun saling menggantungkan kepentingan antara elit politik dengan berbagai unsur yang menunjang keberhasilan elit tersebut. Simbiosis mutualisme itu muncul semakin besar menjelang adanya pemilihan, baik itu pemilihan daerah maupun pusat. Hal ini didukung oleh berbagai kasus patronase yang terjadi di Indonesia belakangan ini.

Oleh karena itu, menguatnya patronase di Indonesia semakin hari kian membuktikan kebenarannya dengan didukung data-data yang sudah dijabarkan dibab sebelumnya. Bagaimanapun keadaan perpolitikan di Indonesia saat ini, tidak menghilangkan pola patronase yang sudah ada sejak dahulu, bahkan semakin menguatnya pola tersebut belakangan ini. Dengan demikian, penulis meyakini bahwa patronase tidak akan pernah pudar dari perpolitikan di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anonym. (2018) Anies: Warga Betawi Pusatnya Demokrasi di Indonesia  
<https://news.detik.com/berita/d-4192969/anies-warga-betawi-pusatnya-demokrasi-di-indonesia> diakses pada 14 September 2018
- Anonym. (2018). KPUD Jakarta Undi Nomor Urut Cagub DKI Jakarta 2018  
<https://www.rappler.com/indonesia/berita/150254-kpud-jakarta-undi-nomor-urut-cagub> diakses pada 14 Juni 2018
- Anonym. (2018). Rombongan Anies Baswedan Dihadang Jawara di Setu Babakan  
<https://metro.tempo.co/read/1111627/rombongan-anies-baswedan-dihadang-jawara-di-setu-babakan> diakses pada 4 September 2018
- Anonym. (2018). Sandiaga: Budaya Betawi Tak Akan Dipinggirkan  
<http://www.swamedium.com/2017/07/01/sandiaga-budaya-betawi-tak-akan-dipinggirkan/> diakses pada 20 Mei 2018
- Creswell, John W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks : Sage
- Muhaimin, Yahya. (1990). "Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia". Dalam Ahmad Zaini Abar (ed). *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru: Esei-Esei dari Fisipol Bulaksumur*, (Surakarta: CV. Ramadhani)
- Patrick Spread. (1984). "Blau's Exchange Theory, Support and the Macrostructure." *The British Journal of Sociology*, Vol. 35, No. 2, pp.162. Diakses tanggal 12 Februari 2013, dari <http://www.jstor.org/stable/590230>
- Scott, J. (1972a). *Op.Cit.pp.* 92. Diakses tanggal 30 November 2014, dari <http://www.jstor.org/stable/1959280>
- Sutoro, Eko. (2003). *Transisi Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta : APMD Press)